

ANALISIS JURNAL

“PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA”

(Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Jumlah SKS : 2

Semester/Kelas : 2/F

Pengampu Mata Kuliah : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.

2. Drs. Rapani, M.Pd.



Disusun Oleh :

Desmita Maharani (2413053185)

**PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

Jurnal karya M. Husein Maruapey mengangkat isu penegakan hukum di Indonesia dengan mengkaji kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Penulis menjelaskan bahwa keputusan hukum terhadap Ahok bukanlah semata-mata karena tekanan masyarakat atau desakan kelompok tertentu, tetapi merupakan hasil dari proses hukum yang telah melewati prosedur yang sah. Melalui kasus ini, penulis ingin menekankan pentingnya penegakan hukum yang obyektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh opini publik.

Selanjutnya, penulis menyoroti bahwa hukum di Indonesia sejatinya menjamin kesetaraan setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada kenyataannya, masih banyak terjadi diskriminasi, khususnya terhadap kelompok minoritas. Ahok, yang berasal dari etnis Tionghoa dan memeluk agama minoritas, menjadi representasi dari kelompok yang seringkali mendapatkan perlakuan tidak setara, baik di masyarakat maupun dalam sistem hukum itu sendiri.

Dalam konteks ini, penulis memaparkan bahwa identitas Ahok memengaruhi persepsi masyarakat dan perlakuan terhadapnya. Meskipun ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berkomitmen pada pelayanan publik yang bersih, sikapnya yang keras dan latar belakangnya sering kali menimbulkan kontroversi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan budaya turut memengaruhi cara hukum ditegakkan di Indonesia, yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem hukum yang sehat.

Jurnal ini juga menguraikan berbagai tantangan besar yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia, mulai dari rendahnya integritas aparat penegak hukum, pengaruh politik dalam proses hukum, hingga lemahnya lembaga peradilan. Penulis menegaskan bahwa tanpa reformasi sistem hukum yang menyeluruh dan berkelanjutan, keadilan akan sulit diwujudkan. Penegakan hukum tidak cukup hanya berdasarkan aturan formal, melainkan juga harus mencerminkan nilai kejujuran, moralitas, dan keadilan sosial.

Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendorong penegakan hukum yang lebih adil. Penulis mengajak masyarakat untuk aktif dalam mengawal proses hukum dan tidak bersikap apatis. Jika masyarakat terus mendukung praktik hukum yang diskriminatif atau tunduk pada tekanan politik, maka tujuan menciptakan

keadilan hukum tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kesadaran kolektif diperlukan untuk membangun sistem hukum yang benar-benar berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

Jurnal ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia serta kompleksitas yang menyertainya. Penulis menyampaikan bahwa hukum yang adil hanya dapat terwujud jika ada sinergi antara aparat hukum, pemerintah, dan masyarakat. Upaya reformasi hukum harus dibarengi dengan peningkatan integritas moral para penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan begitu, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan secara nyata.